

**PEMBERONTAKAN PETANI UNRA 1943
(Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan
pada Masa Pendudukan Jepang)**

Syamsu A. Kamaruddin

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Veteran Republik Indonesia, Kampus II, Jl. Baruga Raya Antang, Makassar 90145, Indonesia

E-mail: syamsukamaruddin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, latar belakang, kondisi, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan pada 1943. Dalam menganalisis pemberontakan petani Unra sebagai gerakan sosial ditelusuri faktor, kondisi, dan struktur sosial masyarakat yang menjadi basis lahirnya pemberontakan. Faktor ideologi dan peran kepemimpinan juga dikaji untuk mengetahui dan memahami seberapa besar kontribusinya dalam memotivasi terjadinya pemberontakan. Demikian juga, fokus kajian diarahkan pada penelusuran latar belakang kultural keagamaan dalam konteks historis dari pemberontakan petani Unra, dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah pemberontakan petani Unra, sebagai sebuah gerakan sosial, penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dalam perspektif historis. Metode historis digunakan untuk menganalisis proses, dan tahap-tahap perkembangan menurut urutan waktunya secara kronologis. Analisis historis dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa pemberontakan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, ketika pemerintahan pendudukan Jepang berkuasa di Indonesia, khususnya di Unra pada 1943, telah terjadi sebuah perubahan sosial yang cepat, dan dipaksakan dalam bentuk kebijakan ekonomi perang yang membawa penderitaan bagi rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong lahirnya pemberontakan petani sebagai gerakan sosial.

**The Peasants' Revolt of Unra 1943
(A Case of Social Movements in South Sulawesi under Japanese Occupation)**

Abstract

The research aims to describe the background, condition, and factors leading to the uprising of peasants in Unra during the era of Japanese occupation in South Sulawesi in the year 1943. In the analysis of the revolt of Unra peasants as a social movement, I examine the factors, conditions, and community structures that served as the bases of the uprising. Factors such as ideologies and leadership are also considered in order to know the extent to which they motivated and contributed to the event. In the same way, the study also focuses on the cultural and religious backgrounds within the historical context of the revolt, along with the social, economic, and political climates in Unra during the Japanese occupation. In order to reconstruct this historic movement, a qualitative research method is employed from a historical perspective. A historical method is used to analyze the process and developmental stages in a chronological fashion. Historical analysis was done using approaches from other disciplines such as sociology, anthropology, and political science in order to obtain a broader understanding of the revolt. The goal of this approach is to discover the processes of social change and other social indications that may have been involved such as social conflict, disorganization, and lack of integration among rural communities. Research results show that during the time of Japanese rule in Indonesia, particularly in the year 1943 in Unra, a rapid social change occurred and a wartime economic policy was forced upon the people. This then became the motivating factor behind the uprising of peasants as a social movement.

Keywords: era Javanese occupation, social movement case study, the peasants revolt of Unra

1. Pendahuluan

Pemerintah kolonial Hindia Belanda, terusir dengan masuknya bala tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi-organisasi pedesaan secara langsung dihubungkan dengan kepentingan perang dalam pengertian politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk tujuan ini, pemerintah pendudukan Jepang memperkenalkan lembaga-lembaga sosial baru kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada penduduk desa, diantaranya adalah "*kumiai*" (koperasi), dan "*tonarigumi*" (rukun tetangga) (Nagazumi, 1998).

Kebijakan mobilisasi massa oleh pemerintah pendudukan Jepang juga dilakukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan politik perang di wilayah pendudukan untuk mendukung upaya Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Upaya pemerintah pendudukan Jepang ini ialah bagaimana menarik simpati rakyat, dan mengindoktrinasi, mereka sehingga menjadi lebih bersimpati dalam mendukung upaya Jepang untuk memobilisasi rakyat dalam menghadapi Perang Asia Timur raya. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi mentalitas rakyat Indonesia menuju kesesuaian pandangan tentang "cita-cita menuju lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya" (Kurasawa, 1993).

Implikasi politis perang ini adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pedesaan selama berlangsungnya pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Selatan pada masanya. Hal ini terlihat dari upaya Jepang memobilisasi penduduk desa dalam bentuk organisasi sosial politik baru, seperti: *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Keamanan), *Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat), dan pendidikan di Sekolah (Kurasawa, 1993).

Kerangka kebijakan politik perang pemerintah pendudukan Jepang, telah memberikan beberapa implikasi positif, seperti di bidang pendidikan, mengingat pada masa akhir pemerintah kolonial Belanda, sebagian besar sekolah yang ada ditutup. Namun, ketika pemerintah pendudukan Jepang masuk, sekolah-sekolah dibuka kembali, dan bendera Merah Putih dikibarkan, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan (Soedjito, 1987). Selain implikasi positif, pemerintah pendudukan Jepang juga mengandung implikasi negatif dan merugikan rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat di pedesaan, yang terdiri dari petani. Kebijakan yang sangat merugikan dan membawa penderitaan itu, ialah diterapkannya sistem "*politik beras*" atau wajib serah padi secara paksa (Kurasawa, 1993, De Jong, 1987) terhadap petani di desa, yang bertujuan untuk kepentingan logistik bala tentara pendudukan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, sebagaimana yang terjadi di Desa

Unra Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 1943. Faktor-faktor inilah yang memicu terjadinya perlawanan rakyat di pedesaan, terutama di daerah-daerah lumbung beras, seperti yang terjadi di Desa Unra, yang akan menjadi kajian studi ini.

Selain faktor "wajib serah padi", yang menjadi faktor lain dalam memicu terjadinya pemberontakan petani ialah, perubahan struktur otoritas tradisional di pedesaan. Selama pemerintahan pendudukan Jepang, hubungan antara pemerintah lokal, seperti kepala desa, lurah, dengan rakyatnya semakin melemah. Tidak lagi terjadi hubungan "*patron klien*" (melindungi dan dilindungi), tetapi justru yang terjadi adalah para kepala desa atau lurah dijadikan wakil pemerintah yang bertugas memerintah secara otoriter dan memaksa rakyat menyerahkan padinya kepada pemerintah pendudukan Jepang (Scott, 1975). Kondisi inilah yang membuat kepala desa, atau lurah di mata petani dipandang sebagai penindas, ketimbang sebagai pelindung dan penyelamat.

Studi ini bertujuan mengkaji sebagian dari perubahan-perubahan sosial itu, dengan cara menganalisis kebijakan politik beras pemerintah pendudukan Jepang, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Unra, dan beberapa konsep yang menyertai terjadinya pemberontakan petani Unra, termasuk unsur-unsur ideologi tradisional yang mempengaruhi bangkitnya semangat perlawanan petani terhadap kekuasaan.

Rumusan Masalah. Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka studi ini akan memfokuskan perhatiannya pada analisis masalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pemberontakan petani Unra di Sulawesi Selatan pada 1943? (2) Bagaimana jalannya peristiwa, dan peran tokoh petani dalam pemberontakan petani Unra di Sulawesi Selatan pada 1943? (3) Bagaimana dampak pemberontakan petani Unra terhadap situasi kehidupan rakyat Unra pada 1943?

Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani Unra sebagai gerakan sosial di Sulawesi Selatan pada 1943; (2) Mengkaji dan menelusuri proses dan jalannya peristiwa, serta peran para tokoh petani dalam pemberontakan petani Unra di Sulawesi Selatan pada 1943; (3) Menguraikan dampak pemberontakan petani Unra terhadap situasi kehidupan rakyat Unra di Sulawesi Selatan pada 1943.

Penelitian Terdahulu. Studi mengenai pemberontakan petani sebagai gerakan sosial di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sudah dilakukan oleh beberapa kalangan, seperti Sartono Kartodirdjo, dalam kajiannya mengenai pemberontakan petani Banten pada 1888. Sementara, pemberontakan petani

pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, juga telah dilakukan setidaknya oleh dua orang ilmuwan Jepang, yakni Aiko Kurasawa, dan Akira Nagazumi di Pulau Jawa.

Secara khusus, kajian mengenai pemberontakan petani pada masa pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan masih sangat langka. Kurangnya minat terhadap masalah ini disebabkan oleh kurangnya sumber informasi atau data yang memadai, terutama arsip yang ditinggalkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, sehingga tidak mengherankan bahwa studi mengenai pemberontakan petani di Sulawesi Selatan masih dilakukan secara terbatas oleh beberapa kalangan, di antaranya: Sagimund (1985), dengan judul "Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Fasisme Jepang". Dalam salah satu bagian dari tulisannya itu, dibahas mengenai pemberontakan petani Unra. Tulisan ini menjelaskan, bahwa latar belakang terjadinya pemberontakan adalah diterapkannya sistem wajib penyerahan padi oleh rakyat kepada pemerintah melalui kepala desa atau lurah setempat (Sagimund, 1985).

Tulisan ini cenderung melihat, peristiwa sejarah hanya dari satu aspek semata, dan tidak melihat berbagai dimensi yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Walaupun demikian, tulisan ini memiliki data historis yang dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk itu, tulisan Sagimund perlu dikaji ulang untuk mempertegas kebenaran versi para pelaku sejarah yang berbeda dengan sumber lainnya. Sejauh mana kebenaran fakta sejarah yang dikemukakan? Masalah ini menjadi bagian yang akan diteliti dalam studi ini.

Daud Limbu Gau (1991), yang secara khusus menulis tentang pemberontakan petani Unra dengan judul "Gerakan Protes Petani Unra, Suatu Sejarah di Pedalaman Agraris Sulawesi Selatan", telah membahas peristiwa itu secara singkat. Namun, pembahasannya cenderung mengabaikan fakta-fakta historis. Hal ini, terjadi karena Daud Limbu Gau, berpendapat bahwa pendudukan Jepang adalah satu-satunya faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani Unra. Kesimpulannya terlalu apriori terhadap suatu peristiwa sejarah. Apakah terdapat faktor lain yang turut berpengaruh ataukah ideologi masyarakat turut memobilisasi petani melakukan pemberontakan? Hal-hal ini tidak dikaji secara khusus.

Dalam studi lainnya, Pawiloy (1989) yang mengkaji secara khusus "Arus Revolusi di Sulawesi Selatan", menempatkan pemberontakan petani Unra sebagai subbagian dari tulisannya, sehingga, walaupun penulisnya mencoba mengungkapkan latar belakang terjadinya pemberontakan, pengkajiannya tetap tidak memadai sebagai karya yang komprehensif tentang pemberontakan petani Unra. Hal ini dapat dimengerti, karena, dalam studinya, Pawiloy hanya menekankan

aspek-aspek tertentu dari setiap revolusi yang terjadi dari 1942 sampai 1949 di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, data yang ditampilkan sangat membantu untuk mengkaji lebih lanjut proses terjadinya pemberontakan tersebut.

Ketiga studi di atas, pada umumnya masih bersifat fragmentaris, dan menekankan aspek-aspek politik semata dari semua masalah yang memungkinkan terjadinya pemberontakan petani Unra. Pemberontakan ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek politik semata, melainkan dapat dikaji secara multidisipliner, terutama dari segi struktur sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai tradisi, yang memungkinkan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya pemberontakan. Oleh karena itu, studi ini akan berusaha mengkaji, dan mengemukakan persoalan-persoalan yang belum terjangkau oleh ketiga penulis di atas.

Gerakan Sosial (Beberapa Pengertian). Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama perilaku kolektif (Sztompka, 2010:325). Secara formal, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang meliputi kolektivitas itu sendiri (Tadeusz, 1989; Margaret, 1986; Banks, 1972; Sztompka, 2010). Demikian juga dalam pengertian yang lain, Turner & Killian dalam Sztompka (2010:325) menjelaskan bahwa, "gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi masyarakat itu". Batasan tentang gerakan sosial yang sedikit formal, adalah seperti yang diungkapkan oleh Horton (1999), yakni bahwa gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan. Pendapat ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Lauer (1976) dan Dobson (2001), bahwa "gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengendalikan perubahan atau untuk mengubah arah perubahan".

Gerakan sosial, lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap suatu kondisi atau keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisasi, dan tidak terarah, serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Orang-orang saling membagi duka, dan mengeluh. Pemimpin dan organisasi dalam kebanyakan gerakan, biasanya muncul tidak lama setelah situasi keresahan sosial tercipta. Setelah mengalami tahap penurunan kegiatan, kadang kala gerakan-gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen, dan seringkali pula gerakan itu hilang begitu saja tanpa bekas yang berarti (Horton, 1999; Kartodirdjo, 1992).

Begawan sejarah, Sartono Kartodirdjo, menguraikan bahwa, gerakan sosial adalah: gerakan perjuangan yang dilakukan oleh golongan sosial tertentu melawan

eksploitasi ekonomi, sosial, politik, agama, dan kultural, oleh kelompok penekan, apakah itu penguasa atau negara. Termasuk dalam gerakan semacam ini, di antaranya, adalah kaum petani dan buruh (Kartodirdjo, 1992; 1978).

Sehubungan dengan konsep yang dikemukakan di atas, dengan menelusuri perkembangan kisah gerakan sosial yang semakin beraneka ragam dalam konteks kontemporer, maka tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Giddens (1993; 1994), mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga yang mapan. Definisi yang kurang lebih sama, dikemukakan oleh Tarrow (1998), gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang, dan pemegang wewenang. Dari definisi ini, gerakan sosial dapat dipahami sebagai gerakan kolektif yang bersifat menentang untuk mencapai tujuan kolektif pula.

Sementara itu, Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik. Politik perlawanan dapat mencakup gerakan sosial, siklus penentangan, dan revolusi. Politik perlawanan dapat terjadi, ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lainnya yang menekan rakyat. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial, dan digaungkan atau disuarakan oleh resonansi kultural, dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan menjadi matang, dan melahirkan gerakan sosial yang berupa pemberontakan (Pratiwi, 2011). Demikian juga, (Akram-Lodhi & Cristobal, 2010a; 2010b) dalam redaksi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, menjelaskan bahwa, protes-protes sosial petani adalah merupakan perlawanan balik yang berkepanjangan dari sekelompok rakyat untuk bertahan, melindungi diri, bahkan melancarkan perlawanan terhadap para penguasa, atau kelompok kapitalis.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa, tanpa adanya ketidakpuasan, gerakan sosial pun tidak mungkin tercipta. Tapi, pendapat ini agak diragukan, bila mengacu pada pendapat Charles Tilly, dan Horton, yaitu bahwa faktor ketidakpuasan belum memberikan penjelasan yang cukup bagi faktor penyebab terjadinya gerakan sosial. Sejauh ini, belum ada bukti yang meyakinkan menyangkut kaitan antara kadar keluhan dan ketidakpuasan, dengan tingkat keaktifan sebuah gerakan sosial (Tilly, 1978; Horton, 1999).

Ketidakpuasan, memang merupakan kondisi yang diperlukan dalam proses kelahiran suatu gerakan sosial, akan tetapi kondisi ketidakpuasan itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan sebuah gerakan sosial. Dalam hubungannya dengan itu, Hopper, seorang sosiolog, memandang gerakan sosial sebagai tempat penyaluran kegagalan pribadi. Ia mengatakan, bahwa:

...banyak sarjana yang berpandangan bahwa banyak gerakan mendapat dukungan dari kalangan orang yang kecewa, dan tidak bahagia dalam kehidupannya, seperti orang yang merasa bosan, tidak cocok dengan keadaan, orang yang kreatif, tetapi tidak mampu berkreasi karena mendapat tekanan, dan golongan orang yang merasa tertindas. Golongan inilah yang banyak melibatkan diri dalam gerakan sosial untuk menyalurkan aspirasinya, dan mengisi kehampaan hidupnya dengan melibatkan diri dalam gerakan sosial. Sangat masuk akal, jika orang yang merasa kecewa dan gagal lebih tertarik pada gerakan sosial atau pemberontakan, daripada orang yang puas dan senang. Meskipun dianggap masuk akal, teori ini tidak ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat. Memang sulit untuk mengukur kadar perasaan ketidakpuasaan seseorang, meskipun kita dapat menarik beberapa kesimpulan, namun tidak mudah membuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya (Hoffer dalam Horton, 1999).

Dari beberapa teori di atas, dapat dikemukakan bahwa, menyangkut gerakan sosial petani atau pemberontakan petani Unra, maka teori gerakan sosial yang relevan untuk dipakai adalah: teori ketidakpuasan dengan cara aksi kolektif atau teori aksi kolektif (Tilly, 1978). Pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan, ketidakadilan, perampasan hak, dan tindakan kekerasan oleh penguasa atau negara (Dobbin, 1992).

Tahapan Gerakan Sosial. Proses tahapan sebuah gerakan sosial, adalah meliputi: (1) Tahap ketidaktentraman (keresahan), ketidakpastian, dan ketidakpuasan, yang semakin meningkat; (2) Tahap perangsangan, yakni ketika perasaan ketidakpuasan sudah semakin memuncak. Penyebabnya sudah diidentifikasi, dan ada ajakan, serta petunjuk-petunjuk dari kalangan tokoh sebagai pembangkit semangat emosi massa; (3) Tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa, dan taktik telah dimatangkan; (4) Tahap institusionalisasi, yakni ketika organisasi telah diambil alih dari pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi, serta rencana telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir dari kegiatan aktif gerakan sosial; (5) Tahap pembubaran (disolusi), yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi atau justeru mengalami pembubaran. (Siahaan, 2000).

Pada kasus pemberontakan petani Unra di Sulawesi Selatan pada 1943, tahap 3 di atas tidak dilalui alias tidak terlaksana, karena, setelah pemberontakan, para pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Makassar.

2. Metode Penelitian

Dalam mengkaji pemberontakan petani Unra, studi ini menggunakan metodologi strukturalis berbasis historis. Metodologi strukturalisme berintikan sejumlah konsep, yaitu keterlibatan agensi, struktur sosial, dan mentalitas (Lloyd, 1993a). Agensi adalah individu-individu atau kelompok sosial yang memiliki kemampuan atau kuasa untuk memproduksi atau mentransformasi struktur sosial (Archer, 1998). Secara ontologis, agensi adalah bagian mutlak dari struktur sosial, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa struktur sosial. Transformasi struktur sosial sepanjang sejarah, senantiasa mencakupi adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi, dan reorganisasi yang silih berganti. Dalam perubahan sosial atau proses modernisasi, terjadi perubahan secara fundamental dan kualitatif pada jenis solidaritas yang menjadi prinsip ikatan kolektif, yaitu dari ikatan komunal menjadi kekuatan asosiasional, kolektivitas yang berupa organisasi yang kompleks dan pergeseran loyalitas, dari yang primordial ke loyalitas pada lembaga-lembaga yang berskala besar (Lloyd, 1993b).

Sementara itu, mentalitas adalah, bagaimana agensi memahami mereka sendiri dan dunianya, serta bagaimana mereka mengekspresikan mentalitas mereka melalui ritus-ritus agama, ideologi, kepercayaan, ide-ide, dan nilai-nilai yang dianut. Faktor-faktor ini semua memberi inspirasi dalam membentuk pola, dan sikap yang radikal, yang disebut sebagai faktor pembentuk pikiran, ide, dan nilai-nilai. Dari komponen inilah sesungguhnya dapat diketahui mengapa kaum petani memberontak (Braudel, 1979; Burke, 1990; Geertz, 1980; Block, 1989; Tilly, 1981; Lloyd, 1993a; Scott, 1985; 1975).

Dari aspek struktur sosial, agensi terlepas dari penjelasan individu yang membentuknya. Struktur sosial memiliki unsur-unsur, seperti peran (*roles*), interaksi antarperan (*relationship*), aturan-aturan (*rules*), dan budaya dalam arti mentalitas. Dengan struktur ini, proses perkembangan peristiwa dapat dijelaskan melalui aspek struktur tindakan para pelaku atau pemberontak. Sebab, setiap peranan atau fungsi dilakukan dalam kerangka pola sosial budaya masyarakat (Lloyd, 1993b). Berbagai gejala struktur sosial di dalam sebuah peristiwa, situasi, dan perkembangan sejarah pemberontakan petani, dapat dijelaskan sebagai kerangka referensi, seperti antara lain: (a) Struktur sosial yang mencakupi berbagai golongan sosial, serta hubungan-hubungannya; (b) Struktur agraris di daerah pedesaan, dengan mencari adanya berbagai golongan petani yang dibedakan berdasarkan kepemilikan tanah, serta hubungan kerjanya dengan tanah; (c) Struktur kekuasaan, yang mencerminkan hirarki dalam sistem politik; (d) Struktur kepribadian (*personality*), yang terbentuk pada pola kelakuan, dan sikap seseorang

sebagai pengendapan sifat, watak, dan nilai-nilai yang dihayati oleh pribadi tersebut; (e) Struktur organisasi, yang senantiasa tampil dalam jaringan antar-anggota dan anggota dengan pemimpin (Kartodirdjo, 1992b).

Dalam perspektif teori strukturalis di atas, peristiwa pemberontakan petani Unra sebagai fakta sejarah yang unik, adalah merupakan solidaritas komunal yang terbentuk atas dasar sentiment-sentimen, perasaan-perasaan, dan keterikatan-keterikatan antara sesama warga di desa, antara warga suku, sehingga mampu membentuk wadah aksi-aksi kolektif berdasarkan sentimen-sentimen komunal, bukan atas dasar solidaritas yang rasional, sehingga akibatnya memberikan corak gerakan yang bersifat lokal atau regional yang menurut Geertz (1963) dan Paige (1975) disebut ikatan *primordial*. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa tujuan studi ini tidak hanya untuk melukiskan apa yang terjadi, dan kapan terjadinya, melainkan juga bagaimana, dan apa sebab-musababnya peristiwa itu terjadi. Persoalan-persoalan itu jelas harus mengacu kepada masalah-masalah sebab-musabab, dan faktor kondisional yang menyertainya. Oleh karena itu, pengkajian harus diarahkan kepada analisis yang merupakan kerangka penelitian ini, yaitu: struktur politik ekonomi pedesaan pada masa pendudukan Jepang; basis massa pergerakan sosial petani; ideologi gerakan petani; serta dimensi-dimensi kultural yang mendorong terjadinya pemberontakan sebagai gerakan sosial (Alfian, 1992; Munir, 2010).

Metode penelitian, menurut Gilbert J. Garraghan, adalah seperangkat asas yang sistematis yang digubah untuk membantu secara efektif mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikannya dalam sebuah karya tulis (dikutip dalam Alfian, 1987).

Referensi mengenai metode penelitian yang banyak dirujuk dalam penulisan sejarah sosial di Indonesia, adalah karya Sartono Kartodirdjo "*The Peasants Revolt of Banten 1888*" (1984); "*Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*", dan "*Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*", oleh James C. Scott (1985; 2000); dan "*Petani Suatu Tinjauan Antropologis*", karya Eric R. Wolf (1985). Penulis banyak mengacu kepada buku tersebut dalam menganalisis peristiwa pemberontakan petani Unra, di samping juga menggunakan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan gerakan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan sejarah sosial, maka perlu dikaji, dan dikemukakan, bahwa situasi yang kompleks dapat dilihat dari aspek insiden-insiden, dan urutan-urutan insiden yang menentukan hubungan sebab akibat di antara faktor-faktor variabel, apakah itu bersifat ekonomis, sosial, politis, kultural, maupun keagamaan (Kartodirdjo, 1984). Dalam hal ini penulis tidak menganut paham, bahwa faktor tunggal adalah satu-

satunya penentu di dalam terjadinya peristiwa sejarah, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi yang memungkinkan turut memicu terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Untuk dapat memberikan penjelasan yang komprehensif, maka penulis menggunakan banyak analisa, agar deskripsi historis dapat diuraikan dengan analisis yang ilmiah. Pendekatan multidimensional juga dipakai untuk memperkaya pembahasan historis peristiwa pemberontakan. Dalam melakukan analisis historis, penulis mengkaji berbagai variabel yang dalam konsep sejarah sosial dari Wolf (1985) mungkin turut berpengaruh terhadap lahirnya gerakan sosial, seperti solidaritas, konflik golongan, perilaku, pengelompokan, pimpinan, ideologi, dan sentimen-sentimen harus dikaji secara kausal untuk menemukan akar dari sebuah peristiwa sejarah.

Untuk kepentingan studi dalam penelitian dan penulisan sejarah pemberontakan petani Unra, sumber dokumen tertulis saangat minim dan praktis tidak terlacak dalam arsip nasional di Makassar. Penulis sudah mencoba membuka beberapa arsip nasional di Makassar, namun tidak menemukan dokumen yang menyangkut peristiwa pemberontakan petani Unra. Mengingat kekurangan ini, penulis hanya mampu menggunakan sumber sekunder sebagai bahan untuk penulisan, yakni berupa hasil-hasil penelitian dalam kalangan terbatas mengenai studi gerakan sosial petani di Indonesia, di samping wawancara lapangan dengan informan.

3. Hasil dan Pembahasan

Daerah Peristiwa dan Faktor-faktor Ekologis. Desa Unra yang terletak di bagian utara Kabupaten Bone, masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Awangpone. Letaknya 15 Kilometer dari ibukota Kabupaten Bone, 185 Kilometer dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berpenduduk sekitar 7000 Jiwa (Data Kantor Desa Unra berdasarkan Sensus Penduduk, 2004).

Kata Unra berasal dari kata "*Unrainna Bone*", yang artinya "*benang pada jarum*". Jarum yang dimaksud adalah Bone, sedangkan yang dimaksud benang adalah Unra sendiri; sehingga antara Unra dan Bone tidak dapat dipisahkan, ibarat pasangan benang dan jarum (Hafid, 1993a).

Kata Unra berasal dari kata "*Unrainna Bone*", yang artinya "*benang pada jarum*". Jarum yang dimaksud adalah Bone, sedangkan yang dimaksud benang adalah Unra sendiri; sehingga antara Unra dan Bone tidak dapat dipisahkan, ibarat pasangan benang dan jarum (Hafid, 1993a). Secara administratif, Desa Unra memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: (a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kajuara, Teluk

Bone, dan Desa Matuju; (b) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pacing; (c) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wiroro, dan Desa Jaling; (d) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Cakke Bone, Desa Kading, dan Desa Mallari.

Desa Unra sendiri memiliki empat dusun, yaitu: Dusun Watang Limpo'E, Dusun Watang Unra, Dusun Pepping'Nge, dan Dusun Amessangeng. Keempat dusun ini terdiri dari hamaparan sawah yang luas dan subur. Di tengah perkampungan membentang jalan yang memotong Desa Unra dan menghubungkan daerah di sekitarnya, terutama Desa Kajuara, yang merupakan tetangga dekatnya.

Sepanjang sejarah, rakyat Unra hidup dari bertani. Hal ini karena faktor geografis yang mendukung, yakni terdiri dari tanah persawahan yang subur dan luas. Dengan keadaan fisik dan kondisi daerah yang demikian itulah, Unra sangat menarik bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk memobilisasi rakyat yang terdiri dari petani untuk memenuhi ambisi politiknya, dalam hal pengumpulan padi atau beras (Hafid, 1997b). Namun, perlu diingat, bahwa, ketika pemerintah pendudukan Jepang berkuasa di Indonesia, rakyat hidup menderita, karena hasil panen yang didapat harus disetor kepada Jepang sebagai bahan logistik perang, di samping banyaknya pungutan-pungutan lain dari elite penguasa lokal, sehingga kehidupan pun sangat rawan.

Adanya faktor penghasilan penduduk yang rendah, dan panen yang gagal, sebagai akibat dari musim kemarau yang panjang, atau cuaca hujan yang menyebabkan banjir dan rusaknya hasil panen, telah membawa efek yang gawat pada kelangsungan hidup penduduk Unra, yang terdiri dari kaum petani. Oleh karena itu, tidak mengherankan, kalau di daerah-daerah yang demikian timbul pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah jajahan. Dalam kategori inilah, ketika pemerintah pendudukan Jepang berkuasa di Sulawesi Selatan, Unra yang waktu itu gagal panen, karena musim kemarau panjang, dipaksa oleh pemerintah untuk menyettor padinya, melalui elite penguasa lokal. (Beddu dan Lami, Wawancara, 20 Maret 1999 di Unra). Akibat tekanan hidup yang mencekik leher ini, terjadilah keresahan sosial yang berujung pada pemberontakan.

Selain faktor ekologis, juga secara geografis letak Unra yang terpencil dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bone, mungkin merupakan faktor lain yang dapat menjelaskan tradisi-tradisi mereka, sebagai masyarakat dengan watak yang keras, dan pembangkang. Apalagi ketika pemerintah kerajaan Bone tidak lagi memperhatikan rakyat Unra, karena adanya intervensi pemerintah pendudukan Jepang sebagai penguasa pusat, rakyat Unra justru menjadi lebih menderita karena hanya menjadi pelayan pemerintah dalam memenuhi kepentingannya. Ini patut menjadi perhatian, sekaligus

berkaitan dengan kecenderungan untuk memberontak. Jadi, faktor ekologis yang tidak menguntungkan mungkin sudah cukup mencetuskan motivasi rakyat Unra untuk memberontak.

Sudah barang tentu, curah hujan hanya merupakan salah satu penyebab variasi tahunan yang besar dalam persediaan pangan. Tetapi, tidak berarti, bahwa di daerah-daerah yang beririgasi pun tidak pernah terjadi krisis pangan, dan terhindar dari pergolakan sosial petani. Daerah yang kadang terancam gagal panen karena faktor banjir memiliki pula suatu tradisi pemberontakan yang paling jelas menampakkan diri, yakni setelah panen yang gagal, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah Burma (Sadikin, 2005).

Masalah distribusi persediaan air, di daerah-daerah yang kekurangan curah hujan, juga dapat menjadi titik pusat perselisihan yang mencolok sepanjang sejarah. Yang jelas, adanya pungutan-pungutan yang memberatkan kaum petani, dari penguasa penjajah terhadap penghasilan mereka, dapat menimbulkan keresahan sosial pada masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, daerah-daerah yang tidak menentu atau rawan terhadap subsistensi pangan, seringkali menjadi pusat-pusat perlawanan, sebagaimana terbukti dalam sepanjang sejarah, di Vietnam dan Burma (Scott, 1985).

Memang ada daerah, posisi kaum petaninya ibarat orang yang berdiri terendam dalam air sampai batas leher, sehingga ombak yang kecil pun sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Demikian tulis Tawney tentang kaum petani dan kondisi kehidupannya, yang dikutip oleh Scott dalam bukunya *Moral Ekonomi Petani* (1983). Menurut teori ini, petani memiliki moral ekonomi, yakni mendahulukan selamat, dari pada berorientasi kepada mekanisme profit. Kehidupan petani yang relatif miskin, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan ekonomi dalam jangka panjang, dan tidak tertarik pada kemungkinan memperoleh keuntungan jangka pendek, meskipun berisiko pada kehancuran ekonomi mereka (Scott, 1985).

Moralitas ekonomi mendahulukan keselamatan ini, menurut Sudibyo (1999) merupakan kunci untuk memahami resistensi petani. Petani cenderung menolak perubahan-perubahan pola hubungan ekonomi, dan sosial, yang selama ini dianggap merupakan jaminan bagi keamanan subsistensi mereka. Prinsip mendahulukan keselamatan merupakan sumber kekuatan moral bagi masyarakat petani untuk menolak perubahan, dan bersikap resisten terhadap perubahan atau kenyataan sosial yang tidak memberi pilihan, sebagaimana kasus-kasus pemberontakan petani yang telah berlangsung sepanjang sejarah (Munir, 2010).

Teori di atas tampaknya, paling tidak, dapat menjadi inspirasi dalam mengkaji dan menganalisis kehidupan

petani Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan pada 1943, meskipun teori ini dapat diperdebatkan dalam konteks peristiwa gerakan sosial kontemporer. Deskripsi Tawney dan beberapa pendapat lainnya tersebut memang tidak meleset, yang dengan begitu gamblang menggambarkan kehidupan petani yang mengalami ancaman subsistensi (pangan) (Bernstein & Terry, 2001). Teori inilah yang menjadi kerangka acuan dalam melihat pemberontakan petani Unra.

Relung ekologis yang khas, yang ditempati oleh kaum petani, menyebabkan mereka sangat rawan terhadap risiko subsistensi, yang mengakibatkan runtuhnya kedaulatan pangan petani (Sunaryanto, 2011). Petani Unra yang senantiasa hanya tergantung pada belas kasihan sang hujan, meskipun sawah menghampar luas, telah mengalami krisis subsistensi, yang disebabkan kemarau panjang, sehingga banyak penduduk Unra yang hanya mengonsumsi bonggol pisang (Bugis: *lisu utti*) (Beddu dan Lami, Wawancara 20 Maret 2000 di Unra).

Krisis subsistensi pada masa pakeklik, sebagaimana yang terjadi di Unra pada masa pendudukan Jepang, telah menyebabkan rakyat sangat sulit memenuhi kebutuhan pangannya, ditambah dengan adanya kewajiban secara paksa untuk menyeter beras kepada pemerintah sebanyak 500 liter tiap rumah tangga petani (Sape dan Dawa', wawancara, 20 Maret 2000, di Unra).

Struktur Sosial Ekonomi Rakyat Unra dan Ekonomi Agraris. Dalam menganalisis masalah ini, perhatian difokuskan kepada faktor-faktor ekonomi yang mempunyai korelasi dengan struktur sosial rakyat Unra yang terdiri dari petani. Dengan memperhatikan perkembangan keresahan agraris; dan masalah konflik golongan sosial, perlu ditemukan determinan-determinan sosial ekonomis dari gerakan pemberontakan petani Unra. Di sini akan dilihat, bahwa sebenarnya yang terjadi pada petani Unra pada masa pemerintah pendudukan Jepang adalah konflik sosial, antara pihak pemerintah pendudukan Jepang di satu pihak, dan penguasa lokal sebagai kaki tangan Jepang, yang juga merupakan tuan-tuan tanah, serta petani dipihak lain yang hidupnya tertindas sebagai kelas sosial yang rendah (Sediono & Gunawan, 1984; Al-Atas, 2003).

Pemberontakan petani Unra sebagai bagian dari peristiwa sejarah, akan terlihat melalui pergeseran sosial dalam perjalanan waktu, begitupun dengan proses politiknya, lewat penelusuran kembali perkembangan historisnya. Bagi rakyat Unra, tanah merupakan sumber produksi, kebutuhan, dan pendapatan ekonomi, serta kekayaan utama. Dengan demikian, tanah memiliki arti penting, dan merupakan kedudukan yang menjadi prestise tersendiri bagi petani yang memilikinya. Sebagai akibatnya, klasifikasi penduduk desa

didasarkan pada kepemilikan tanah (Kartodirdjo, 1984; Sediono & Gunawan, 1984).

Dari pernyataan tersebut di atas, kita bisa menelusuri gambaran idaman masyarakat tentang tanah dan kepemilikan tanah. Demikian juga, perlu ditelusuri faktor-faktor ekonomi yang memiliki pertalian dengan struktur sosial masyarakat Unra.

Seperti yang telah dikemukakan pada awal pembahasan, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan demografis, yang terjadi sejak masuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan Jepang, telah mempengaruhi hubungan kekuasaan, dan eksploitasi ekonomi terhadap rakyat di pedesaan (Utami, 2011). Kebutuhan-kebutuhan petani, sebenarnya adalah untuk mempertahankan suatu minimum kalori, suatu biaya penggantian, dan biaya seremonial yang seringkali betentangan dengan keharusan-keharusan yang dipaksakan oleh pemerintah atau penjajah (Suryo, 1985). Akan tetapi, untuk mendefinisikan petani Unra dalam konteks pemberontakan, khususnya dari segi tata hubungan yang menjadikan mereka tunduk kepada golongan-golongan yang berkuasa, maka, kaum petani terpaksa mempertahankan keseimbangan (Tom, 2005). Pemerintah atau penjajah memandang petani sebagai sumber tenaga kerja murah, dan barang yang dapat menambah dana kekuasaannya. Di samping itu, petani juga adalah pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga. Tanahnya adalah satu unit ekonomi (Wolf, 1985).

Perlu pula diuraikan, bahwa usaha kaum petani tidak seluruhnya ditentukan oleh situasi yang merupakan persoalan internal kehidupan mereka sendiri. Kaum petani di pedesaan senantiasa berada dalam suatu sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, sebagai akibat dari polarisasi di lingkungan pedesaan, yang proses distribusi pemilikan tanahnya tidak merata, mereka kemudian sering dianggap sebagai basis konflik di daerah pedesaan (Sediono & Gunawan, 1984; Syani, 1994).

Ketidakpuasan, dan kekecewaan, memang merupakan salah satu sebab dari setiap pemberontakan petani, tetapi tentu saja bukan sebab yang lebih mendalam, demikian pernyataan Henry Lansberger, dan Bahrein, yang melihat pemberontakan petani dalam hubungan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat agraris di Asia Tenggara (Lansberger, 1984, Bahrein, 1997).

Dalam hirarki desa, golongan pemilik tanah bersama-sama dengan pemerintah lokal, yang umumnya juga sebagai tuan tanah, menduduki lapisan sosial atas. Penduduk lainnya yang terdiri dari elite desa diduduki oleh pemimpin agama, seperti haji, kiyai, dan unsur nonbirokrat. Adapun penduduk desa yang terdiri dari kebanyakan kaum petani digolongkan ke dalam

beberapa strata, yaitu: petani biasa, petani penggarap (Bugis: *patteseng-teseng*), buruh tani, dan petani kaya atau tuan tanah. Khusus antara kaum petani miskin, dan petani kaya ini, pada masa pemerintah kolonial Belanda terjadi hubungan yang menguntungkan, yakni saling ketergantungan dan saling membutuhkan, yang dikenal dengan istilah hubungan *patron klien* (Ahimsa, 1988).

Masalah ketergantungan sosial pada masa-masa krisis pangan ketika pemerintah pendudukan Jepang berlangsung di Indonesia, tampak menjadi begitu melemah, karena pemerintah pendudukan Jepang memperlakukan petani kaya, petani miskin, petani penggarap, atau buruh tani dengan status yang sama, yaitu memiliki kewajiban yang sama untuk memusatkan perhatiannya pada pengerahan tenaga kerja untuk memproduksi pangan yang sebanyak-banyaknya, dan kemudian disetorkan kepada pemerintah untuk kepentingan logistik perang Asia Timur Raya (Eduardo, 1997; Fakhri, 2002).

Perkembangan Situasi Politik Menjelang Pemberontakan. Ada pelbagai alasan untuk memusatkan perhatian kepada keresahan sosial di Unra, ketika berlangsungnya pemerintahan pendudukan Jepang. *Pertama*, keresahan itu dapat menjelma menjadi sebuah gerakan pemberontakan yang mendominasi dalam gelanggang sejarah pergolakan petani. Pergolakan yang disertai ambruknya nilai-nilai tradisional, ini ditandai oleh ketidakpuasan, suasana tegang, dan keresahan di kalangan penduduk. Situasi demikian sarat dengan ketegangan yang tidak menentu, yang mudah meletus menjadi pemberontakan. *Kedua*, pembahasan mengenai keresahan sosial, dan beberapa konsekuensi politiknya dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai kecenderungan untuk berontak, atau kehadiran suatu tradisi pemberontakan petani Unra. Keresahan yang meluas di kalangan rakyat Unra, bukan hanya kerusuhan-kerusuhan, tetapi juga kejahatan-kejahatan sosial, seperti pencurian, dan perampokan.

Benar anggapan para analis sosial, bahwa, bilamana situasi tidak memungkinkan rakyat untuk menyalurkan ketegangan mereka melalui kegiatan pemberontakan, maka mereka mencari jalan keluar bagi frustrasi dalam gerakan-gerakan keagamaan, seperti *tarekat*. *Ketiga*, keresahan sosial juga harus dijelaskan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak resmi di dalam suatu masyarakat yang tertindas, di samping golongan-golongan elite yang berkuasa. Keresahan sosial yang terjadi di Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, adalah merupakan satu ciri yang mencerminkan pembusukan administrasi daerah. Sepanjang kurun waktu pemerintahan pendudukan Jepang, Unra telah tampil sebagai gelanggang pemberontakan petani di Bone Sulawesi Selatan, selain pemberontakan yang terjadi di Allu daerah Mandar, pada Maret 1945 (Patang, 1976).

Sesungguhnya, pemberontakan petani Unra, bukan merupakan gejala sporadik, melainkan merupakan ciri yang umum, dan bersifat endemik dalam masyarakat. Catatan sejarah memberikan kesan adanya ledakan-ledakan pemberontakan rakyat yang silih berganti, dengan kadar kehebatan, dan lingkup yang berbeda-beda yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kolonial (Aprianto, 2008; Nancee Lee, 2009). Dari argumen ini mau tidak mau, kita harus menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan, "mengapa kecenderungan untuk memberontak seperti itu terjadi di Unra?" Hal ini dapat ditelusuri akar sejarahnya, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Snouck Hurgronje mengenai pemberontakan rakyat Bone pada masa kolonial Belanda pada 1905, disebabkan adanya penarikan pajak yang memberatkan rakyat (Hurgronje, 1995). Hal ini semakin memperjelas bahwa, sejauh kita dapat berbicara tentang suatu tradisi pemberontakan, satu penjelasan historis dengan perhatian khusus kepada faktor-faktor sosial, penting untuk dikaji secara mendalam, agar diperoleh kesimpulan bahwa, peristiwa sejarah selalu memiliki hubungan-hubungan kausalitas, meskipun dalam konteks peristiwa yang berbeda.

Faktor-Faktor Penyebab Pemberontakan Petani Unra. Dalam pembahasan ini, perkembangan politik pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, akan dilihat kaitannya dengan proses yang mengubah tatanan politik tradisional menjadi perhimpunan politik ala fasisme Jepang. Ciri yang terdapat dalam perkembangan ini; adalah perluasan ruang lingkup politik sentral, pertumbuhan mobilisasi, dan keikutsertaan rakyat petani di pedesaan. Aspek lain dari perkembangan ini adalah terjadinya proses peralihan dari loyalitas tradisional kepada loyalitas birokrat modern versi Jepang. Untuk memahaminya, maka kita harus menyesuaikannya dengan konsep-konsep mengenai latar belakang masyarakat Unra. Selain itu, analisis terhadap pemberontakan petani Unra, harus dilihat dari aspek hirarki nilai-nilai pedesaan, khususnya nilai-nilai tradisi Bugis, pembagian wibawa di dalam masyarakat petani, karakteristik lambang-lambang, dan pola-pola tindakan dalam sistem politik tradisional.

Pemberontakan petani Unra sebagai sebuah gerakan sosial, merupakan gerakan yang menolak secara menyeluruh penetrasi tertib sosial yang ditawarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang waktu itu. Penolakan ini ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentanginya, karena pemerintah dan elite penguasa lokal telah masuk dalam golongan yang memiliki hak-hak istimewa, dan berkuasa dengan sewenang-wenang.

Penulis, tentu saja memiliki analisis dan pandangan, bahwa banyak ragam dan faktor harus dipertimbangkan dalam mengkaji faktor penyebab pemberontakan petani Unra, misalnya soal kemerdekaan ekonomi, disintegrasi budaya, dan penindasan politik. Apa yang sebenarnya

hendak diungkapkan adalah bahwa, salah satu faktor penyebab pemberontakan petani Unra adalah tergusurnya sistem ekonomi dan politik tradisional, dan pemaksaan nilai-nilai *Nipponisasi* ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi faktor yang menyebabkan disintegrasi budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Unra.

Aspek ekonomi, sebagai hal yang penting bagi masyarakat Unra, di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang mengalami eksploitasi. Hal ini dinyatakan dalam bentuk peraturan wajib serah padi bagi petani kepada pemerintah, yang sangat memberatkan, dan mencekik leher. Apalagi, semasa pemerintah pendudukan Jepang berlangsung, rata-rata panen petani mengalami kegagalan, sehingga terjadi krisis subsistensi.

Dari aspek politik, juga demikian halnya lembaga politik tradisional, seperti lembaga desa mengalami perubahan secara dramatis. Pemerintah tidak segan-segan menyingkirkan aturan-aturan, dan norma-norma politik tradisional yang dijunjung tinggi oleh rakyat (Fox, 1990). Satu contoh yang jelas, ialah ketika terjadi suksesi kepemimpinan kepala desa di Unra, pemerintah sering ikut campur di dalam proses pemilihan, dan pengangkatan kepala desa, tanpa melibatkan rakyat. Dengan demikian, pemerintah pendudukan telah mengabaikan cara-cara konvensional mengenai pemilihan pemimpin yang berlaku pada masyarakat Unra, yang selalu dijunjung tinggi melalui aturan-aturan adat tradisi, seperti *pangadereng* (Mattulada, 1975; Koentjaraningrat, 1999; Muntholib, 2009).

Insiden di Rumah Ibanna sebagai Prolog. Pada 1943, diawali dengan sebuah insiden di rumah Ibanna, tepatnya 10 September 1943 (Beddu, Wawancara 23 Maret 2000, di Unra). Ibanna adalah salah seorang petani penduduk Unra yang belum menyetor semua tunggakan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap penduduk Unra. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak mampu lagi menumbuk padi karena usianya telah lanjut, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan pemerintah. Waktu itu, Ibanna masih mendapat konsesi dari utusan "*onderdistrik*" Jaling. Yang dimaksud "*onderdistrik*" dalam tulisan ini ialah daerah kecamatan (Sagimund, 1985) Jadi, yang dimaksud utusan *onderdistrik* Jaling ialah utusan atau wakil pemerintah kecamatan yang berjanji suatu saat akan kembali lagi untuk menagih tunggakan setoran padinya. Tiga hari sebelum pemberontakan berkecamuk, kepala *onderdistrik* Jaling Andi Mannuhung dan para pengawalinya mendatangi lagi rumah Ibanna untuk mengambil beras. Tetapi, Andi Mannuhung bersama pengawalinya kecewa, sebab mereka hanya mendapatkan tiga bakul kecil beras yang sudah ditumbuk, sehingga utusan tersebut langsung naik ke loteng rumah (Bugis: *rakkianng*) untuk mengambil padi.

Menurut saksi mata, sebelum mereka mengambil padi, terlebih dahulu mereka membuka bubungan rumah Ibanna (Bugis: *timpa' laja*) sebelah selatan, agar mudah mengambil padi yang ada di atas loteng. Kemudian, padi-padi itu diambil, dan dibuang ke tanah. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Ibanna, yang langsung melaporkannya kepada salah seorang keluarganya yang bernama Ipagga, dan berkata "*tegapo melomate*", yang artinya "di mana lagi kau akan mati". Mendengar perkataan seperti itu, Ipagga kemudian pergi ke tempat kejadian; akan tetapi, kedatangannya membuat suasana semakin panas, dan dia sendiri menjadi sasaran kemarahan Andi Mannuhung dan para pengawalinya. Salah seorang pengawal, yakni Andi Dambu, langsung memukul Ipagga dengan pedang. Diperlakukan seperti itu, Ipagga melakukan perlawanan, tetapi tidak berdaya, dan ditangkap (Hajji Palaloi, Wawancara, 23 Maret 2000, di Unra).

Berita tentang insiden tersebut segera tersebar di seluruh Desa Unra, dan perkampungan-perkampungan di sekitarnya. Tidak lama berselang, sejumlah penduduk datang dan berteriak dalam bahasa Bugis, "*lappessanggi' annyarang'na*, artinya: lepaskan kudanya. Yang dimaksud di sini ialah kuda-kuda yang dikendarai oleh Andi Mannuhung beserta pengawalinya, supaya mereka tidak dapat melarikan diri. Di antara para penduduk yang datang ke tempat kejadian, ialah Hajji Temmale, seorang tokoh masyarakat Unra yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa atau jurutulis desa (Bugis: *Sariang*). Berkat bantuan Hajji Temmale, rombongan Andi Mannuhung dapat meninggalkan tempat kejadian tanpa menimbulkan korban jiwa.

Aksi Protes di Rumah Sullewatang Unra (Kepala Desa Unra) dan Situasi Politik yang Memanas. Pada malam harinya, setelah terjadinya insiden di rumah Ibanna, rakyat Unra berkumpul di sekitar rumah Ibanna, untuk berjaga-jaga agar jangan sampai Andi Mannuhung beserta pengawalinya datang untuk mengambil kembali padi yang telah dibuang dari loteng rumah Ibanna, sehingga padi-padi itu berserakan di tanah. Untuk itu, penduduk secara bersama-sama mendatangi rumah Guru Imante untuk meminta pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pemerintah yang semakin memberatkan penderitaan rakyat.

Menurut seorang informan, Guru Imante hanya memberikan saran kepada penduduk Unra, agar pergi ke perbatasan desa antara Unra dan Jaling, dan juga disarankan agar semua penduduk membuka baju, serta sarungnya, sehingga hanya memakai celana kolor saja (Bugis: *sulara' pappuru*). Maksudnya adalah agar Andi Mannuhung beserta pengawalinya tidak berani lagi kembali; atau siap dihadang di perbatasan desa. Setelah itu, banyak penduduk siap siaga di perbatasan desa, untuk menunggu kedatangan Andi Mannuhung beserta pengawalinya, namun sampai menjelang pagi yang

ditunggu tidak muncul, sehingga penduduk kembali ke rumah masing-masing. Paginya, penduduk Unra dibawah pimpinan Guru Imante bersepakat untuk mendatangi rumah kepala desa Unra Andi Satinja, untuk melakukan aksi protes, sehubungan dengan tindakan aparat pemerintah terhadap rakyat Unra. Aksi ini terjadi pada 21 September 1943. Tujuan utama aksi ini ialah untuk menangkap Andi Dambu yang telah memukul Ipagga pada waktu insiden di rumah Ibanna. Namun, tujuan itu tidak tercapai, karena Andi Dambu tidak berada di tempat itu. Oleh sebab itu, penduduk Unra semakin marah, dan beteriak-teriak memanggil orang-orang yang ada di dalam rumah kepala desa Unra, namun tidak ada yang menanggapi. Akhirnya, sebagian penduduk berinisiatif masuk ke dalam rumah, namun dicegah oleh Hajji Temmale, yang sedang berada di halaman rumah, bersama Kulasse, dan Mejje (Sape, wawancara, 23 Maret 2000, di Larappi).

Suasana yang tegang itu, hampir mencapai puncaknya, seandainya tidak dicegah oleh Hajji Temmale. Dalam kesempatan itu, Hajji Temmale menyampaikan pidato singkat, bahwa "tindakan aparat desa yang telah melakukan pemaksaan penyetoran padi terhadap rakyat kepada pemerintah Jepang, akan segera diatasi", dan ia juga menyampaikan nasihat kepada Tipu, menantunya "sadarlah kamu itu adalah menantu saya, dan juga keponakanku, kalau ingin membunuh salah seorang dari mereka, lebih baik kau membunuh saya". Inilah yang kemudian dalam analisis peristiwa sejarah pemberontakan petani Unra, menyebabkan Hajji Temmale dicap sebagai orang yang melindungi aparat yang berlaku kejam terhadap rakyat. Hajji Temmale kemudian mendapatkan hukuman adat dikucilkan dari penduduk Unra, setelah pemerintah pendudukan Jepang menyerah dan tidak berkuasa lagi (Baco Gatta, wawancara, 24 Maret 2000, di Unra).

Setelah mengadakan aksi protes di rumah kepala desa Unra, Guru Imante kemudian menyampaikan himbauan, dan ajakan:

.... jika kalian masih menganggapku sebagai pemimpin, dan sebagai keluarga, apalagi sebagai sepupu-sepupuku, dan jika kalian memang tidak mau ikut dalam gerakan dan perjuanganku untuk menentang ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan di bumi Unra ini, itu berarti kalian sudah memisahkan ikatan darah di antara kita, beserta segala yang berkaitan dengan kehidupanku. Untuk itu habislah segala-galanya yang ada di antara kita. Artinya putuslah hubungan keluarga di antara kita. Bagi mereka yang ingin berpihak, dan setia kepadaku, maka mulai malam nanti kuharapkan kalian semua hadir. Sedangkan yang akan ikut, tetapi belum sempat, maka boleh datang kira-kira pukul 8.00 pagi di alun-alun Abbolang'Nge. (Baco Gatta, wawancara, 24 Maret 2000, di Unra).

Setelah menyampaikan himbauan, dan ajakannya kepada penduduk Unra, Guru Imante kemudian berpaling kepada Sullewatang Unra (Kepala Desa Unra)

Andi Satinja, dan Sullewatang Jaling, Andi Mannuhung untuk bertemu besok pagi di alun-alun Abbolang'Nge, sebagai penentu siapa yang laki-laki, dan siapa yang berada di pihak yang benar (Semarang, wawancara, 22 Maret 2000, di Unra).

Sullewatang Unra, Andi Satinja yang merasa keselamatan dirinya terancam, memutuskan untuk menyingkir ke rumah orang tuanya di desa Jaling. Tujuannya untuk meminta perlindungan dari ayahnya Andi Mannuhung, dan pemerintah Jepang. Jadi, antara Kepala Desa Unra (Sullewatang Unra) Andi Satinja, dan Andi Mannuhung ada hubungan antara anak dan Bapak. Andi Satinja adalah anak Andi Mannuhung. Kepergian Andi Satinja ke Jaling, di kawal oleh Hajji Temmale, Dullah, dan Meje. Kepergian mereka tidak diketahui oleh penduduk desa Unra. Sesampainya di desa Jaling, Dullah dan Meje, diperintahkan oleh Hajji Temmale untuk kembali ke Unra untuk mengantisipasi situasi dan kondisi, serta segala kemungkinan yang terjadi. Sementara itu, Hajji Temmale, dan Andi Satinja berangkat ke Watampone, ibukota pemerintahan Bone, untuk melaporkan kepada kepolisian dan urusan pemerintahan, yaitu Arung Ponceng Andi Abdullah, bahwa situasi keamanan semakin panas di Unra. Pada waktu itu juga, Arung Ponceng Andi Abdullah, beserta pengawalnya satu regu kepolisian bersenjata api berangkat ke Unra. Di antara rombongan Arung Ponceng, terdapat Andi Patarai selaku Mantri Polisi, Marsuki, Andi Ukkase, Tume Daeng Pawawo, Beddu, Nara, Pabittei, dan Sangka, masing-masing sebagai polisi.

Rombongan itu tidak langsung menuju desa Unra, tetapi mereka singgah dahulu di rumah kepala desa Jaling untuk beristirahat. Pada dini hari, Rabu, 22 September 1943, baru rombongan tersebut berangkat menuju desa Unra. Dalam rombongan ini, kepala desa Jaling (Sulleawatang Jaling) Andi Mannuhung turut serta. Dalam perjalanan, Hajji Temmale bersama kepala desa Unra Andi Satinja, tidak langsung menuju desa Unra, tetapi keduanya menuju desa Cempa untuk menemui Mado Cempa (Kepala Kampung) Cempa. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, karena Mado Cempa diduga berpihak kepadanya, dan kepada pemerintah pusat pendudukan Jepang di Watampone. Namun, maksud mereka sia-sia, karena orang yang akan ditemuinya tidak berada di tempat (Hajji Saguni, wawancara, 23 Maret 2000, di Unra).

Persiapan Pemberontakan. Kedatangan Arung Ponceng, yang juga anggota "adat tujuh" (*ade' pitu'e*), yang menangani masalah keamanan dan urusan pemerintahan di Bone, tidak diketahui oleh penduduk Unra. Mereka hanya mengetahui, bahwa Hajji Temmale bersama Andi Satinja berangkat ke Watampone untuk melaporkan bahwa rakyat Unra akan mengadakan pemberontakan. Sejak itulah Guru Mante beserta

seluruh penduduk Unra yang bergabung dengannya siap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Hal ini mengingatkan mereka pada ramalan Guru Mante, bahwa suatu saat akan datang kegelapan beberapa hari lamanya. Pada waktu itu, bulan tidak menunjukkan cahayanya, yang menandakan sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti desa Unra.

Sementara itu, Guru Mante sejak sore harinya telah mencoba mengontak beberapa sahabatnya, juga murid-muridnya, beserta seluruh penduduk, untuk membicarakan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi yang akan terjadi, termasuk persiapan pemberontakan. Oleh karena itu, pada malam harinya, Rabu 23 September 1943, segera dilakukan pertemuan kilat di rumah Itipu, untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dalam pertemuan ini, banyak murid, dan sahabat Guru Mante yang datang dari luar desa Unra, seperti dari desa Ulaweng, desa Kacimpang, dan desa Maroanging, dengan maksud bergabung dengan penduduk Unra dalam satu gerakan pemberontakan melawan pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Guru Mante (Hajji Saguni, wawancara, 22 Maret 2000, di Unra).

Pemberontakan di Mulai. Tepat pada Kamis, 23 September 1943, bertepatan dengan 8 Syawal 1364 H, atau seminggu setelah hari Raya Idul Fitri, Arung Ponceng beserta rombongan tiba di Unra untuk mengadakan pemeriksaan sesuai laporan yang diterimanya. Pertama diperiksa adalah rumah-rumah penduduk, namun rata-rata rumah penduduk sudah pada kosong ditinggalkan penghuninya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana persiapan penduduk untuk melakukan pemberontakan, dan menghadapi kekuatan militer Jepang. Selain itu, juga untuk mengetahui di mana rakyat dan pimpinan pemberontak memusatkan pertemuan-pertemuannya dalam menyusun kekuatan. Para petani berprinsip bahwa lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Manusia tidak akan mati sebelum ajal tiba.

Setelah mendengar, bahwa rakyat Unra memusatkan kekuatannya di alun-alun Abbolang'Nge di bawah pimpinan Guru Mante, aparat kepolisian dan utusan pemerintah menuju ke tempat itu. Suasana makin mencekam, dan dua kekuatan berhadap-hadapan, yakni kekuatan rakyat Unra dan kekuatan aparat kepolisian.

Sebelum terjadi kontak senjata di antara kedua belah pihak, datanglah Arung Awangpone Andi Pananrangi ke tempat kejadian. Kedatangan Andi Pananrangi adalah untuk menjadi penengah; agar rakyat Unra mengurungkan niatnya untuk memberontak. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan himbauan dalam bahasa Bugis, "*talingekko iko maneng rak'yatku, engkaka mai, nasaba adecengeng'mu maelo ritakko*", yang artinya: sadarlah wahai rakyatku, bahwa

kedatanganku kemari hanyalah untuk kebaikanmu semua. Namun, nasihat atau himbauan itu tidak mempan lagi (Hajji Palaloi, wawancara, 23 Maret 2000, di Unra). Rakyat diperintahkan untuk meletakkan senjatanya secara sukarela, yang berupa badik, pedang, dan keris, serta tombak. Namun, imbauan itu tidak diindahkan oleh rakyat. Seketika itu juga, muncul Andi Mannuhung, menerobos ke tengah-tengah kerumunan penduduk; dan berkata “berikan saya jalan, saya mau melihat tampang orang yang pernah menantang saya (maksudnya adalah Guru Mante), kalau dia laki-laki seperti yang pernah diucapkannya, maka saya siap sekarang untuk menghadapinya”. Selanjutnya, Andi Mannuhung berkata kepada anaknya Andi Dambu “mana orangnya”? Andi Dambu kemudian menunjuk Ikepo, dan langsung menendangnya. Orang ini diberi gelar Ikepo, karena kakinya pincang sebelah.

Melihat perlakuan Andi Mannuhung terhadap Ikepo, rakyat kemudian serentak melakukan serangan terhadap aparat kepolisian beserta rombongan pemerintah yang datang, di bawah pimpinan komando Guru Mante. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak, sehingga korbanpun berjatuhan. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan itu, Arung Awangpone dan Arung Pongceng bermaksud melarikan diri dari arena pertempuran, namun karena sudah terkepung oleh pemberontak, mereka terjepit dalam arena pertempuran. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mautpun menjemput Arung Pongceng Andi Abdullah, yang tewas dalam pertempuran itu, disusul kemudian oleh kepala desa Unra Andi Satinja, Kepala desa Jaling Andi Mannuhung, dan anaknya sendiri Andi Dambu, yang tewas secara bersama-sama. Para pemberontak belum puas sampai di situ, dan mereka terus melakukan perlawanan secara gencar terhadap aparat kepolisian pemerintah. Hanya sebagian kecil saja dari pihak polisi dan wakil pemerintah yang tersisa dan melarikan diri dari kejaran pemberontak (Semang, wawancara, 23 Maret 2000, di Unra).

Menjelang dhuwur, pertempuran berakhir, dengan kemenangan di pihak pemberontak. Tetapi, kemenangan itu, dirasakan oleh pemberontak hanya bersifat sementara, karena mereka menyadari, bahwa pasti akan datang serangan balik dari pihak pemerintah, karena banyaknya wakil pemerintah dan aparat polisi yang tewas dalam pertempuran itu. Perlu diuraikan di sini bahwa, berdasarkan data yang diperoleh, dalam pertempuran antara pemberontak dengan pihak aparat kepolisian dan wakil pemerintah di *Abbolang’Nge*, telah tewas beberapa orang, di antaranya: Arung Pongceng Andi Abdullah, Sullewatang Jaling (kepala desa Jaling) Andi Mannuhung, Andi Dambu (anak Andi Mannuhung), Komandan Polisi Marzuki, Tume Daeng Pawawo, dan Sullewatang Unra (Kepala Desa Unra) Andi Satinja, yang kesemuanya dari unsur pemerintah (Semang, wawancara, 23 Maret 2000 di Unra).

Selanjutnya, terjadi situasi yang tidak menentu pasca meletusnya peristiwa pertempuran di *Abbolang’Nge*, karena tersebar berita, bahwa akan datang pasukan tentara Jepang dari Watampone untuk melakukan penangkapan, dan serangan militer terhadap penduduk Unra, untuk mencari pemimpin pemberontak. Berita ini disampaikan oleh Hajji Kulasse, yang menyarankan agar semua penduduk Unra menyingkir ke luar desa, untuk menghindari serangan balik tentara Jepang. Namun, rakyat memilih untuk tetap bertahan, dan siap menghadapi segala kemungkinan terburuk.

Berita mengenai meletusnya pemberontakan petani Unra, sampai kepada Raja Bone di Watampone, yang segera memerintahkan aparat kerajaan, yang dikawal oleh pasukan Jepang untuk segera menuju desa Unra (Hajji Saguni, wawancara, 24 Mei 2000, di Unra). Sementara itu, pihak pemberontak dibawah pimpinan Guru Mante memusatkan kekuatan penuh dalam persiapan menghadapi kekuatan tentara Jepang yang diperkirakan segera tiba. Tepat keesokan harinya, pada 24 september 1943, rombongan aparat pemerintah dan tentara Jepang tiba di Unra, dan langsung menuju ke tempat konsentrasi kekuatan pemberontak di *Abbolang’Nge*. Melihat pemberontak dalam keadaan siap tempur, tentara Jepang melepaskan tembakan peringatan, agar para pemberontak menyerah. Namun, hal itu tidak membuat para pemberontak menghentikan perlawanannya, bahkan justeru mereka bergerak maju secara serentak menyerang tentara Jepang. Pada saat itulah pemimpin pemberontak Guru Mante, dan beberapa pemberontak lainnya gugur di arena pertempuran. Jadi, Guru Mante; baru tewas setelah pasukan Jepang didatangkan dari Watampone. Sebelumnya, ketika pecah pertempuran di *Abbolang’Nge*, tidak ada satupun anggota pemberontak yang tewas.

Dengan gugurnya pemimpin pemberontak Guru Mante, pimpinan kemudian diambil alih oleh Itipu. Itipu sebagai pemimpin baru pemberontak tidak lama setelah kejadian itu, ditangkap oleh tentara pendudukan Jepang, dan dibawa ke Watampone, selanjutnya dibawa ke Makassar; dan dipenjarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sampai pemerintah Jepang meninggalkan Indonesia; dan setelah Indonesia merdeka, Itipu tidak diketahui di mana keberadaannya (Lami, Wawancara, 23 Maret, 2000, di Unra).

Akhir Pemberontakan dan Dampaknya bagi Rakyat Unra. Tewasnya pemimpin pemberontak (Guru Mante) mengejutkan semua orang, baik anak buahnya sendiri, maupun rakyat Unra yang turut dalam pemberontakan. Hal ini dikarenakan umum sudah mengetahui, bahwa Guru Mante mengajarkan tarekat “*awaraningeng*” atau ilmu kekebalan, dan mereka tidak yakin bahwa ia tewas tertembus peluru. Akhirnya, seiring dengan waktu, tidak

ada lagi pemimpin yang karismatis seperti Guru Mante, dan berakhirlah pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Unra. Namun, perlu juga diuraikan bahwa, ketika terjadi pemberontakan di Unra pada 23 September 1943, ada beberapa orang murid Guru Mante dari kampung Kacimpang Desa Ulaweng yang ikut serta membantu petani Unra dalam pemberontakan. Banyak rakyat Unra yang melarikan diri bersama Mappede dari Desa Ulaweng, dan di sanalah mereka menyusun kekuatan baru untuk mengadakan perlawanan yang lebih terorganisir. Namun, belum sempat mereka menyusun kekuatan, gerakan mereka sudah diketahui oleh Jepang.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam upaya penangkapan para pemberontak, telah ditangkap kurang lebih 300 orang (Abduh, 1985). Mereka yang ditangkap terdiri dari Hajji Temmale, yaitu Sekretaris Desa Unra, dengan tuduhan tidak mampu mengatasi atau mencegah terjadinya pemberontakan. Hal inilah barangkali yang menjadi pertimbangan, mengapa ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara hingga tewas. Penangkapan massal, dan penyiksaan oleh tentara Jepang, mengakibatkan terjadinya eksodus rakyat Unra ke luar desa untuk menghindari penangkapan. Para pemberontak yang ditangkap, pasca pemberontakan ialah: Dullah, Mappiare, Hajji Temmale (meninggal di dalam penjara), sedangkan Itipu, Pagga, Bennu, Massi, dan Ikepo, tidak diketahui nasibnya sampai sekarang (Hajji Palaloi, wawancara, 22 Maret 2000, di Unra). Untuk menghindari penangkapan, banyak rakyat Unra yang merantau ke negeri seberang, seperti Malaysia, Sumatera, Kendari, Pomalaa, Brunai, dan Tawao.

Analisis atas Pemberontakan Petani Unra. Dari kasus pemberontakan petani Unra, tampak jelas bahwa kebijakan dalam bidang pertanian pada masa pendudukan Jepang yang mengarah pada eksploitasi sumber daya ekonomi akan mendapat reaksi negatif dari petani karena dianggap mengancam keamanan subsistensi mereka (Dewi, 2007; Nugroho, 2010). Petani cenderung untuk terus melekat pada cara hidupnya yang tradisional. Setiap hal yang baru, menurut mereka, akan membahayakan keseimbangan yang ada. Pada waktu yang bersamaan, petani juga mendukung usaha mempertahankan hubungan-hubungan sosial tradisional dan pengeluaran dana-dana seremonial yang diperlukan untuk menopang hubungan-hubungan itu (Benyamin, 1973). Selama hubungan-hubungan itu dapat dipertahankan, petani dapat menolak penetrasi lebih lanjut oleh tuntutan-tuntutan kekuasaan. Namun, apabila hal ini tidak dapat dipertahankan, maka di situlah keseimbangan terancam, sehingga melahirkan keresahan sosial yang dapat berujung pada gerakan pemberontakan (Freeman, 1979).

Selanjutnya, aspek ideologi dan kepemimpinan tampak secara jelas dalam pemberontakan petani Unra ketika

seorang tokoh agama yang bernama Guru Mante, dengan aliran tarekat "*awaraningeng*" yang dianutnya, tampil sebagai tokoh pemimpin pemberontakan, sebagaimana juga dijumpai pada beberapa pemberontakan petani di Indonesia pada masa penjajahan, seperti pemberontakan petani di Banten, Ciomas, Kaplongan, Indramayu, dan Sindang (Kurasawa, 1993). Tokoh agama yang tampil sebagai pemimpin pemberontak mampu memberi sugesti kepada rakyat, dengan ramalan-ramalannya tentang datangnya suatu masa ketika masyarakat akan hidup makmur, sejahtera, adil, dan tenteram, disertai lahirnya seorang tokoh pemimpin yang adil, yang oleh Sartono Kartodirdjo disebut dengan ideologi *milleniarisme* (Kartodirdjo, 1978). Harapan-harapan ini mampu menggugah dan memikat rakyat pedesaan untuk ikut serta dalam aksi-aksi kolektif menentang dominasi kekuasaan penjajah. Analisis ini mempertegas bahwa pembagian peran tokoh agama, di satu pihak, sebagai pendukung spiritual bagi pemberontakan, dan di pihak yang lain, sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat dalam pemberontakan. Ini adalah fakta kesejarahan yang umum bahwa tokoh agama memegang peranan penting sebagai pendukung dan pemimpin pemberontakan.

Pendapat ini, setidaknya dibenarkan oleh Kuntowijoyo (2002) dan Abdurrahman Wahid (1977) bahwa kecenderungan petani bersifat radikal, tidak dapat dilepaskan dari faktor ideologi yang merupakan wahana pembimbingan alam pikiran bagi para petani, sehingga mereka memiliki kesadaran kesamaan nasib dan kesadaran terhadap musuh yang sama; dan hal itu didapatkan dari tokoh agama yang posisinya berada di luar kekuasaan atau birokrat. Namun, untuk kasus Unra, suatu gejala baru yang berbeda dengan kasus pemberontakan petani di daerah lainnya di Indonesia muncul, yaitu bahwa beberapa di antaranya sebaliknya justru berpihak pada pemerintah dan mengulurkan tangan untuk membujuk, menghimbau, dan bahkan menipu petani, seperti yang diperankan oleh Hajji Temmale. Hal ini terjadi karena pemerintahan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan berusaha menjalin kerjasama dan kerap kali memberi peran-peran politik penting kepada tokoh agama (Kurasawa, 1993).

Di sini, tampak bahwa pemerintah berusaha mentransformasikan para tokoh agama dari sumber-sumber potensial menjadi agen yang dapat dipercaya dalam propaganda pemerintah. Para tokoh agama yang terpilih untuk bekerja bagi pemerintah pendudukan Jepang diharapkan dapat menjadi kolaborator yang menguntungkan. Namun, di pihak rakyat, tokoh agama tersebut dipandang berpihak kepada pemerintah dan menentang kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat mengabaikan peran tokoh agama ini dan mencapnya sebagai "haji Jepang" (Kurasawa, 1993).

4. Simpulan

Dari hasil analisis atas pemberontakan petani Unra, dapat disimpulkan bahwa: Ada dua faktor utama penyebab terjadinya pemberontakan, yaitu: penyebab langsung dan tidak langsung. *Penyebab langsungnya* ialah: perlakuan kasar penagih setoran kepada warga desa dan perilaku kekerasan aparat polisi ketika melakukan inspeksi ke desa Unra dalam rangka melakukan penagihan kewajiban setoran beras kepada warga, sebagaimana yang terjadi terhadap Ibanna. Perlakuan kasar penagih setoran, dengan menaiki loteng dan membuka paksa bubungan rumah Ibanna untuk mengambil padi dan membuangnya ke tanah telah memicu kemarahan rakyat Unra. Tindakan ini juga telah melanggar norma adat-istiadat dan simbol-simbol budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, yaitu bahwa padi mengandung nilai magis dan tidak boleh dibuang ke tanah karena akan membuat petani sulit mendapatkan pangan atau gagal panen. Di pihak lain, perlakuan kasar aparat polisi dan pemerintah terhadap Ipagga, seorang petani Unra, dengan memukul dan menendangnya telah mempercepat proses terjadinya pemberontakan. Sementara itu, *penyebab tidak langsungnya* ialah adanya penetapan kewajiban setor beras dari pemerintah pendudukan Jepang kepada petani, yang kuotanya 500 liter per kepala rumah tangga. Selain faktor ini, juga disebabkan adanya musim paceklik dan musim kemarau, sehingga kebijakan wajib setor beras yang diberlakukan oleh pemerintah membuat petani semakin menderita.

Hal lain yang juga menjadi faktor penyebab pemberontakan ialah terjadinya penggerogotan martabat tokoh-tokoh adat dan pemimpin lokal, yakni terjadi perampasan otoritas kepemimpinan lokal oleh pemerintah pendudukan Jepang, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini telah menimbulkan persepsi di kalangan petani atas pemimpin mereka, terutama dilihat dari fakta sejarah bahwa, sewaktu pendudukan Jepang, pemerintahan desa ditempatkan di bawah kontrol pemerintah pusat secara langsung, dan pejabat desa ditempatkan sebagai agen pemerintah dan bukan sebagai pemimpin rakyat. Perubahan status ini membuat para petani atau penduduk desa semakin hilang kesetiaannya kepada pemimpin mereka, bahkan berbalik menjadi musuh yang harus diperangi. Tampak dengan jelas bahwa sifat dasar pemberontakan benar-benar spontan. Tidak ada dukungan organisasi, bersifat non-politis, serta tidak direncanakan dengan matang, bila dilihat dari cara petani melakukan pemberontakan dan perkembangan sesudah pemberontakan. Tetapi, pemberontakan itu mempunyai pemimpin dan basis ideologi, yakni gerakan tarekat. Prakarsa pemberontakan diambil oleh petani biasa, tokoh tarekat, dan sekaligus tokoh agama yang berada di luar kalangan birokrat desa.

Pemberontakan petani Unra pada 1943 memperlihatkan berbagai persoalan penting yang dihadapi masyarakat pedesaan, pada masa pendudukan Jepang. Pemberontakan petani Unra harus dilihat sebagai ungkapan keresahan sosial sebagai dampak perubahan sosial yang cepat dan dipaksakan. Krisis ini menghancurkan jalinan moral masyarakat petani pada puncak kesulitan fisik yang mengancam subsistensi ekonomi mereka, sehingga membuat mereka menentang kekuasaan secara terbuka.

Pertama, dari aspek historis, meskipun gerakan petani yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang tidak sebanyak yang pernah terjadi di Pulau Jawa dan daerah lainnya dalam sejarah, telah terbukti bahwa kasus gerakan petani adalah merupakan kasus yang umum terjadi di berbagai tempat, disebabkan adanya eksploitasi ekonomi, sumber daya alam, dan tenaga kerja, serta tekanan-tekanan dari pihak kekuasaan atau Negara (Jerico, 2009). Kasus Unra ini telah membuka tabir sejarah sosial di Sulawesi Selatan bahwa, dalam upaya melepaskan belenggu dari penjajahan Jepang, para petani di Sulawesi Selatan telah menunjukkan kecenderungan memberontak. Namun, untuk membangun tulisan ini, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk memperkuat analisis teoritisnya berdasarkan kajian-kajian akademis.

Kedua, dari aspek gerakan sosial petani yang bersifat kontemporer sekarang ini, terjadi perubahan paradigma dan orientasi yang membedakannya dengan gerakan sosial petani tradisional. Oleh karena itu, kajian mengenai gerakan sosial petani sekarang ini harus ditujukan untuk melihat bahwa kebanyakan kasus gerakan petani yang muncul akhir-akhir ini tidak hanya melibatkan petani saja, seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda dan Jepang, tetapi melibatkan juga dari berbagai latar profesi, etnis, dan agama. Hal ini menunjukkan, bahwa gerakan sosial petani telah mengalami penguatan. Mereka telah memiliki basis kuat dalam proses mengusung isu-isu yang diperjuangkan dan dalam proses pengorganisasian gerakan. Pengusungan isu gerakan petani, sebagai bagian dari perlawanan terhadap neokapitalisme dan neoliberalisme di bidang pertanian, merupakan kontribusi kalangan kelas menengah baru dalam mendukung gerakan petani. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah, sejak zaman kolonial hingga masa Orde baru, dan hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Ketiga, meskipun gerakan sosial petani telah memiliki basis penguatan dalam mengusung isu-isu yang diperjuangkannya, seperti dalam “Serikat Petani Pasundan” (SPP), “Serikat Petani Sumatera Utara” (SPSU), “Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh” (Permata) (Suharko, 2006), dan serikat-serikat yang lainnya, selama kebijakan pemerintah mengenai regulasi pertanian tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,

selama itu pula gerakan sosial petani dan aksi-aksi pemberontakan akan terus berlangsung sepanjang sejarah.

Daftar Acuan

- Abduh, M. (1985). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (1945-1949)*. Jakarta: Puslit Sejarah dan Budaya Depdikbud.
- Ahimsa, H.S. (1988). *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Akram-Lodhi, A.H., & Cristobal, K. (2010a). Surveying the Agrarian Question (Part 1), Unearthing Foundation, Exploring Diversity. *Journal of Peasant Studies*, 37, 177-202.
- Akram-Lodhi, A.H., & Cristobal, K. (2010b). Surveying the Agrarian Question (Part 2), Current Debates and Beyond. *Journal of Peasant Studies*, 37, 255.
- Al-Atas, S.F. (2003). Pengkajian Ilmu-Ilmu Sosial Menuju ke Pembentukan Konsep Tepat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 72, 1-23.
- Alfian, T.I. (Ed.). (1987). *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aprianto, T.C. (2008). Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria, dan gerakan Sosial di Indonesia Pasca 1998. *Jurnal Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik*, 12, 1.
- Archer, M.S. (1998). *Culture and Agency*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tadeusz, B. (1989). *Studies on the Collective Representation of Time and Space in the Durkheimian Sociological School*. Wroclaw: Ossolineum.
- Banks, J.A. (1972). *The Sociology of Social Movements*. London: Macmillan.
- Bernstein, H. & Terry J.B (2001). From Peasant Studies to Agrarian Change. *Journal of Agrarian Change*, 1, 1-56.
- Tom, B. (2005). The Journal of Peasant Studies: The Third Decade. *Journal of Peasant Studies*, 32, 153.
- Brown, K. (2003). Difference in Practice: Questioning Collective Identity on Social Movements in Action. *Jurnal Online*. Diakses 17 April 2012 dari <http://www.international.activism.uts.edu.au/conference/2003socialmovements/pdf/socmoves.2003.pdf>.
- Burke, P. (1990). *The Franch Historical Revolution*. The Annales School 1929-1989: Polity Press.
- De Jong, L. (1987). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kasaint Blanc.
- Dobbin, C. (1992). *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*. Jakarta: INIS.
- Dobson, C. (2001). Social Movements: A Summary of What Works (<http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/movements.pdf>) in *The Citizen's Handbook: A Guide to Building Community in Vancouver*. Retrieved Nopember, 10, 2007. Diunduh 17 April 2012.
- Eduardo, C. (1997). New Social Movement and Resource Mobilization: The Need for Integration. Dalam M. Kaufman & H. Dilla (Eds.), *Community Power and Grassroots Democracy*. London: Zed Books.
- Fakih, M. (2002). Social Movements sebagai Alternatif terhadap Civil Society. *Jurnal Wacana*, 11, 2.
- Freeman, J. (1979). A Model for Analyzing the Strategic option of Social Movement. *Journal Cambridge*, 69, 5.
- Fox, J. (1990). Editor's Introduction: special issues on 'the challenge of rural democratization, perspectives from Latin America and the Philippines'. *Journal of Development Studies*, 26, 19.
- Giddens, A. (1993). *Sociology*. Oxford: Polity Press.
- Giddens, A. (1994). *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution, The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Hafid, A. (1993a). *Tradisi Pemilikan Tanah pada Masyarakat Bugis di Daerah Kabupaten Bone. (Laporan Penelitian)*. Ujung Pandang: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hafid, A. (1997b). *Pemberontakan Petani Allu (Laporan Penelitian)*. Ujung Pandang: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hurgronje, S.C. (1995). *Aneka Laporan Politik: Banten, Sarekat Islam, Kerinci, Jambi, Bone, Lingga, Riau, dan Pemerintahan Sultan Banjarmasin*. Jakarta: INIS.
- Horton, B.P. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Jerico, P. (2009). Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism. *Jurnal Online*. Diunduh 17 April 2012, dari <http://www.rebellion.org/html>.

- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1992a). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, S. (1992b). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1978). *Protest Movements in Rural Java*. Oxford, New York, Jakarta, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Koentjaraningrat (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntowijoyo (2002). *Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani: Esai-Esai Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lauer, J. (1976). "The New Theoretical Movement", dalam Neil J. Smelser (ed.), *Handbook of Sociology*. Newbury Park: Sage.
- Lansberger, A.H. (1984). *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Limbu Gau, D. (1991). *Gerakan Protes Petani Unra: Suatu Gerakan Sosial di Pedalaman Agraris Sulawesi Selatan (Laporan Penelitian)*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin (tidak terbit).
- Lloyd, C. (1993a). *Explanation in Social History*. London: Basil Blackwell.
- Lloyd, C. (1993b). *The Structures of History*. London: Basil Black Well.
- Mattulada (1975). *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Muntholib, A. (2009). Gerakan Protes Sosial Petani di Jawa pada Masa Kolonial (Dalam Perspektif Sejarah Sosial Pedesaan). *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 36, 78.
- Munir, M. (2010). Perlawanan Para Bandit Terhadap Kolonialisme: Kajian Poskolonial. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 22, 350-359.
- Sediono, M.P.T., & Gunawan, W. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nagazumi, A. (1998). *Pemberontakan di Indonesia pada Masa Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nancee-Lee, P. (2009). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan Petani di Jawa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 132, 8.
- Dewi, O. (2007). Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Informasi*, 12, 3.
- Paige, M.J. (1975). *Agrarian Revolution, Social Movement, and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York: Oxford University Press.
- Patang. L. (1976). *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia (YKGM).
- Pawiloy, S. (1989). *Arus Revolusi di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: DHD Angkatan 45 Sulawesi Selatan.
- Pratiwi (2011). Jika Petani Mengemansipasi Diri. *Jurnal Litbang Pertanian*, 17, 4.
- Sadikin. (2005). Perlawanan Petani: Konflik Agraria dan Gerakan Sosial. *Jurnal Analisis Sosial*, 10, 1.
- Sagimund, M.D. (1985). *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Siahaan, H. (2000). *Gerakan Sosial Petani*. Jakarta: Kompas.
- Soedjito (1987). *Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scott, J.C. (1975). *Exploitation in Rural Class Relations: A Victim's Perspective*. New York: The Asia Society.
- Scott, J.C. (1985). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott, J.C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudibyoy, A. (1999). Wacana Penjarahan dan Kekuasaan Simbolik terhadap Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3.
- Bahreini, S.T. (1997). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suharko (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10, 5.
- Suryo, D. (1985). Gerakan Sosial Petani. *Prisma No. 11, Tahun XIV*. Jakarta: LP3ES.
- Sunaryanto (2011). *Runtuhnya Kedaulatan Pangan*. Jurnal Nasional. Diakses 17 April 2012 dari <http://www.journalnasional online.com>.
- Syani, A. (1994). *Sosiologi, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement, Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Addison Wisley Publishing Company Reading Mas.
- Tilly, C. (1981). *As Sociology Meets History. Studies in Social Discontinuity*. Orlando, San Diego, San Francisco, New York. London: Academic Press, Inc.
- Utami, S.M. (2011). Pengaruh Politik Pintu Terbuka Terhadap Masyarakat Pedesaan di Jawa. *Jurnal Paramita*, 21, 14-24.
- Wahid, A. (1977). Mahdisme dan Protes Sosial. *Prisma No.74, Tahun ke-VII*. Jakarta: LP3ES.
- Benyamin, W. (1973). Demand for Labour and Population Growth in Colonial human Ecology. *Journal Social History*, 1, 217-235.
- Wolf, E. (1985). *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Pers.